

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN BOMBANA 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya

dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Rumbia,

Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BOMBANA



Dr .H. SUNANDAR A.RAHIM .,MM.Kes
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP.19690716 2000031 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
i DAFTAR ISI	
ii DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	
iii IKTISAR EKSEKUTIF	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 UMUM	1
1.2 DASAR HUKUM	1
1.3 PROFIL LAYANAN SKPD	2
1.3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
1.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA	
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	1
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA	1
2.2 PERENCANAAN STRATEGIS	1
2.2.1. VISI DAN MISI	12
2.2.2. TUJUAN DAN SASARAN	13
2.2.3. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA	14
2.3.1. KEBIJAKAN STRATEGIS	14
2.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG DIGUNAKAN	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	16
3.1.1. CAPAIAN KINERJA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASANKEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	16
3.1.2. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN.....	17
3.1.3. CAPAIAN KINERJA BIDANG EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
3.1.4. CAPAIAN KINERJA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN/ REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV. PENUTUP	21
4.1 KESIMPULAN	21
4.2 LANGKAH TINDAK LANJUT	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2022	
2. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2022	
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD BAKESBANGPOL TAHUN 2022	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu unsur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian–capaian kinerja dalam menjalankan visi dan misi organisasi. Di dalamnya memuat penilaian terhadap unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian kinerja.

Adapun mekanisme penyusunan laporan kinerja meliputi analisa terhadap sinergitas antara pencapaian kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis OPD yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan evaluasi juga terhadap perkembangan capaian tujuan dan sasaran dengan menggunakan informasi atau data – data yang diperoleh secara lengkap.

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana pada Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama merupakan outcome dari program–program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan sebagai dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik;
2. Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan;
3. Persentase Konflik yang tertangani;
4. Persentase ORMAS yang Aktif;
5. Persentase Partai Politik Yang Di Bina;

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan beberapa program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial,dan Budaya
5. Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah menjadi PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati Bombana dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2005-2026

dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2017–2022.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2022 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 113 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021;

1.3. Isu Strategis

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bombana yang aman, nyaman, dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Bombana merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana yaitu mengantisipasi berbagai kerawanan sosial, politik yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memiliki visi sebagai fasilitator dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang aman, nyaman dan tenteram dalam menunjang pembangunan kota yang berwawasan budaya

Upaya Badan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: Aspek wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus senantiasa menjiwai pola pandang sikap, penghayatan dan perilaku seluruh warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek Politik, yaitu substansi kebijakan politik dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh keberadaan NKRI, dengan mengembangkan sistem praktik nasional yang demokratis, berkedaulatan rakyat, terbuka serta diarahkan guna membangun bangsa dan watak bangsa menuju bangsa Indonesia yang maju bersatu, demokratis, adil dan makmur. Kabupaten Bombana merupakan kota yang terbuka, sehingga banyaknya penduduk mendatang dan mobilitas penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan gangguan keamanan dan

ketertiban di perkotaan sebagian besar diakibatkan oleh adanya ketidakdisiplinan warga kota terhadap tatanan kehidupan seperti administrasi kependudukan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap tata ruang, pelanggaran dalam bidang bangunan, tempat usaha maupun yang lainnya sehingga menimbulkan kesemrautan kota. Adapun isu strategis di bidang pelayanan keamanan dan ketertiban kota antara lain:

1. Belum optimalnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga untuk dapat beraktivitas;
2. Belum optimalnya jaminan rasa aman dengan memperluas partisipasi semua pihak untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban umum;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan aparat keamanan, Desa, Kelurahan dan kecamatan , dan semua stakeholder yang terkait dalam mengatasi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilu guna mengurangi angka golput melalui pendidikan politik.

1.4. Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bombana. Pelaksanaan tugas sehari-hari, dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- i. Kepala Badan
- ii. Sekretaris
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- iii. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 1. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 2. Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
- iv. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 1. Sub Bidang Penanganan Konflik
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
- v. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
2. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
- vi. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bombana.

2. Tugas Pokok

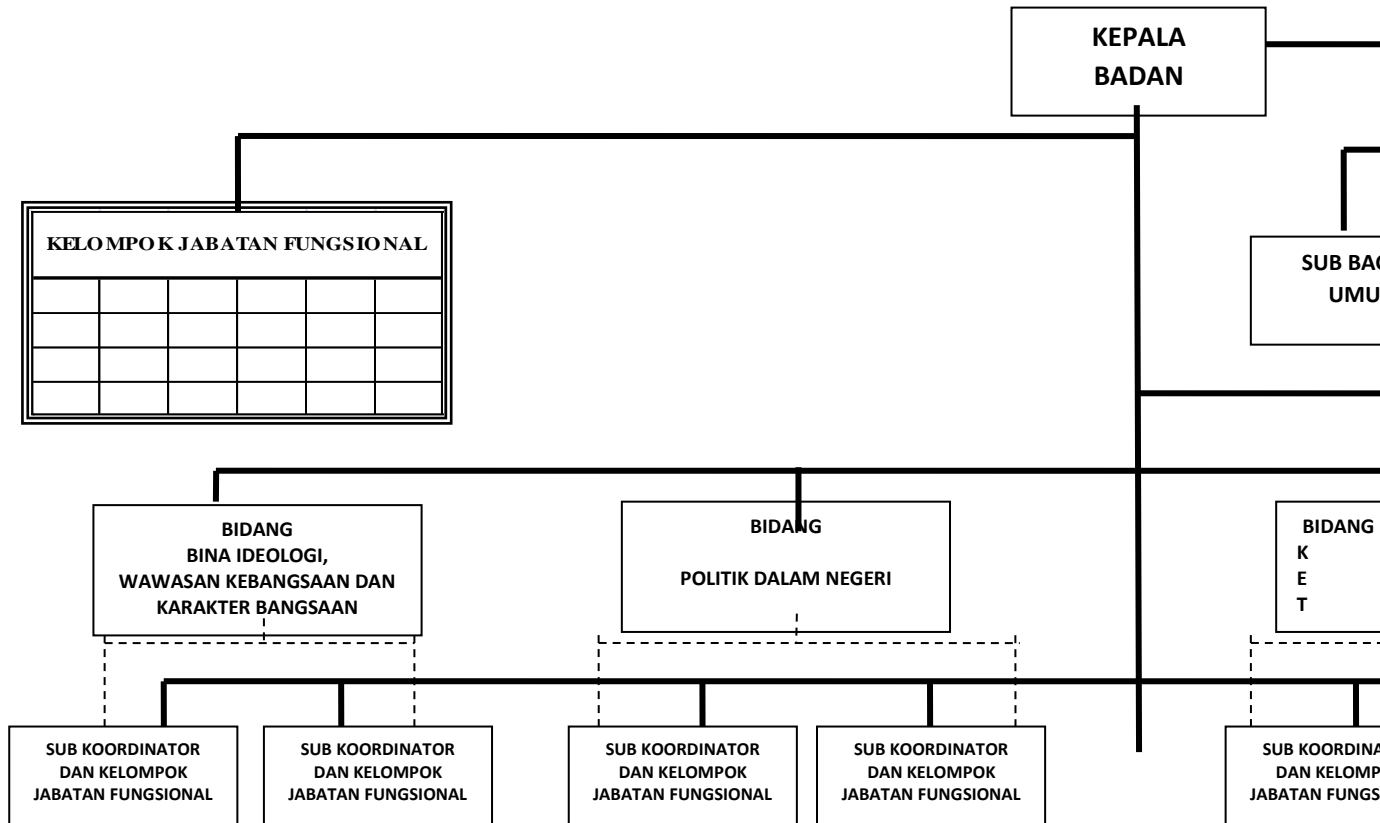
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan fasilitas peningkatan sumber daya manusia Badan Kesbangpol;
- b. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI BOMBANA**
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN BOMBANA



1.5. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana pada tahun 2021 sebanyak 39 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 20 orang dan tenaga kerja Non PNS sebanyak 19 orang. Adapun latar belakang pendidikan dan golongan dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1.1

Jumlah dan Komposisi

PNS dan Non PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bombana Tahun 2021

No	SUB UNIT	JUMLAH
1	Sekretariat	10 Orang
2	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	7 Orang
3	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	7 Orang
4	Bidang Politik Dalam Negeri	7 Orang
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	8 Orang
	Total	39 Orang

Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 4 Orang
4. Kepala Sub Bidang : 8 Orang
5. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
6. Pelaksana : 20 Orang

Data PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Bombana berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table 1.2

Jumlah dan Komposisi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	Total
8 Orang	11 Orang	-	2 Orang	-	20 Orang

Table 1.3

Rekapitulasi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2021 Menurut Golongan/Ruang

Golongan	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	Total
Jumlah (Orang)	1	1	4	2	10	0	0	1	1	0	0	20

Adapun tenaga kerja Non PNS yang dipekerjakan sebagai pelaksanaan administrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 sebanyak 19 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Administrasi : 19 Orang

1.6. Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

Table 1.4

**Daftar Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana
Tahun 2021**

No	Jenis Barang	Jumlah
1	AC	7
2	Alat Dapur Lainnya	2
3	Alat Kantor Lainnya	2
4	Alat Musik	1
5	Alat Rumah Tangga Lain	6
6	Buku Umum	1
9	Dispenser	5
10	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1
11	Handy Cam	1
12	Jam	2
13	Kendaraan Roda Dua	12
14	Kendaraan Roda Empat	1
15	Kipas Angin	2
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11
19	Kursi Staf	30
20	Kursi Tamu	1
21	Lambang Garuda	1
22	Laptop	8
23	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	8
24	Meja Biro	24
25	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
27	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11
28	Meja Komputer	8
29	P.C (Personal Computer)	8
30	Papan Nama Instansi	1
31	Papan Pengumuman	1
32	Printer	12

1.7. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana selama tahun 2021. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

IKTHISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, isu strategis, struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor, serta sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dan Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2021.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan 2022
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
4. Rencana Aksi Tahun 2021 dan 2022
5. Indikator Kinerja Utama

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana tidak lepas dari aturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017–2022, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2005–2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Bombana Tahun 2005–2025 .

Dalam RPJPD Kabupaten Bombana Tahun 2005–2025, Visi yang diemban adalah

“Mewujudkan Bombana Sejahtera(Munajah) tahun 2017-2022”. Kata “Sejahtera ” dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofi dari suatu keadaan masyarakat kabupaten bombana yang religius, berkeadilan, Aman Sejahtera dan berbudaya, **Religius**; Terwujudnya Kerukunan Antar Umat beragama, terpenuhinya hak hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan Emosional (Kepedulian social), **Berkeadilan**; Seluruh lapisan Masyarakat di beri peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang Merata. **Aman**; Terjamainnya rasa Aman Masyarakat dalam melakukan Aktifitas sosial, Politik dan Ekonomi. **Sejahtera**; kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung Terciptanya tinggi kearifan local yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbudaya; menumbuh kembangkan nilai nilai dasar msyarakat bombana yang agamis, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang Menyatu pada akar Budayanya dan nilai nilai social yang bersifat universal.

Misi

Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas maka ada 5(Lima) misi Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Melanjutkan Percepatan Infrastruktur; di maksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; di maksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. Melanjutkan pembangunan Ekonomi; di maksudkan untuk menciptakan suatu system perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi kerakyatan melalui sector pertanian, peternakan/kelautan sebagai andalan utama
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia; di maksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sector Pendidikan dan kesehatan.
5. Melanjutkan Pemantapan pembangunan Budaya masyarakat Bombana; di maksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaanya yang di dasari pada budaya local.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2017–2022 disusunlah suatu perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penetapan kinerja yang dibuat awal tahun 2021 telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2021 antara dengan Kepala Badan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara Kepala Bidang dengan Kepala Sub bidang atau Sub bagian masing – masing. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.1

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman Masyarakat tentang Kehidupan berdemokrasi	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	75%	80%	83%	85%	88%
			Persentase Partai Politik Yang Di Bina	100 %	100 %	100%	100%	100%
			Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	75%	80%	83%	85 %	89 %
			Persentase ORMAS yang Aktif	75%	80%	86%	90%	100%
			Persentase Konflik yang tertangani	100 %	100%	100 %	100%	100%

2.1.2 Program Kegiatan

Rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Adapun program dan kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana untuk Tahun Anggaran 2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2
Program dan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	a. Perumusan Kebijakan teknis dan emantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik,fasilitasi kelembagaan partai politik,peningkatran demokrasi,fasilitasi kelembagaan perwakilan dan partai,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,serta oemantauan situasi politikPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	a. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik b. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	a. Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

No	Program	Kegiatan		
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	a. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	<table border="1"> <tr> <td>a. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</td> </tr> <tr> <td>b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</td> </tr> </table>	a. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
a. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah dengan PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2021 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang

program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, transparan dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bombana untuk Tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Indikator Kinerja Utama

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dan Target Kinerja Tahun 2021

- Tugas Pokok : 1 Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2 Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1 Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	Jumlah Pemilih (17-45 Thn) Yang Pernah Memperoleh Pendidikan Politik di bagi Jumlah Wajib Pilih (17-45 Thn)Di kali 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana	Laporan Bidang Politik dalam Negeri	85%

<i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021</i>						
		2 Persentase Partai Politik Yang Di Bina	Jumlah Pengurus Partai Politik yang mengikuti Pelatihan di bagi Jumlah Pengurus Partai Politik di kali 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana	Laporan Bidang Politik dalam Negeri	100%
		3 Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah Masyarakat (17-60 Thn) Yang Mengikuti Pembinaan di bagi jumlah Masyarakat(17-60 thn)lokasi pembinaan kali 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten bombana	Laporan Bidang Bina Ideologi Wawasan kebangsaan	85%
		4 Persentase ORMAS yang Aktif	Jumlah ORMAS aktif di bagi jumlah ORMAS yang terdata di kali 100	Badan Kesatuan dan Politik kabupaten bombana	Laporan Bidang	100%
		5 Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah Penanganan Kejadian Terkait Konflik di bagi jumlah Kejadiandian kali 100	Badan Kesatuan	Laporan Bidang	100%

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2020, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja belum dapat berjalan secara optimal dari pada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran ada yang belum mencapai 100 persen.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Uraian Kinerja Tahun 2021		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realiasi	Capaian
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	75%	80%	83%	85%	85%	100%
	Persentase Partai Politik Yang Di Bina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	75%	80%	83%	85%	85%	100%

	Persentase ORMAS yang Aktif	75%	80%	86%	90%	90%	100%
	Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. Pengukuran Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 (Data Terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2021 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut.

Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Tahun 2021
. Persentase Pemilih (17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	85%	75%	80%	83%	85%	100%

Pada indikator persentase menurunnya kasus-kasus sosial terjadi peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2018 adalah sebesar 75% naik menjadi 80% pada tahun 2019, naik menjadi 83% pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan menjadi 85% di tahun 2021. Tahun 2021, merupakan tahun terberat dikarenakan adanya kasus pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Kabupaten Bombana khususnya yang menyebabkan hal tersebut berimbas pada stabilitas keamanan dan perekonomian. Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana dalam tupoksinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang aman, nyaman dan tenteram ikut ambil andil sebagai Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bombana bersama OPD lainnya dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bombana.

Tabel 3.4

**Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Pemilih(17-45 thn)
yang memperoleh pendidikan politik s/d Akhir Periode Renstra**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan %
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	88%	75%	80%	83%	85%	96,6%

Tabel 3.5

**Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase
Pemilih(17-45thn) yang memperoleh Pendidikan politik**

Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2021	Persentase Realisasi
Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	Rp 719.472.486	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000	Rp 719.472.486	Rp 719.472.486	100%

Tabel 3.6

Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Persentase Pemilih(17-45thn) yang memperoleh Pendidikan Politik

Realisasi Kinerja dan Anggaran						Kinerja 2021			Anggaran 2021		
Tahun 2018 (%)		Tahun 2019 (%)		Tahun 2020 (%)		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100	75%	100	80%	100	83%	85%	85%	100%	Rp/719.472.486	Rp 719.472.486	100%

Tabel 3.7

Cost per Outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh Pendidikan Politik

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	100%	100%	100%

Tabel 3.8

Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Tahun 2021
2. Persentase Partai Politik Yang Di Bina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada indikator persentase Partai Politik Yang di Bina capaian realisasi, dari capaian di tahun 2018 adalah sebesar 100% tetap menjadi 100% pada tahun 2019, begitu pula tahun 2020 menjadi 100 %, dan tetap signifikan 100% di tahun 2021. Di tengah masa pandemi Covid-19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinerjanya.

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Partai Politik yang di Bina s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan %
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Partai Politik Yang Di Bina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.10

Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Partai Politik yang di Bina

Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2021	Persentase Realisasi
Persentase Partai Politik Yang Di Bina	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%

Tabel 3.11

Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Partai Politik yang di Bina

Realisasi Kinerja dan Anggaran						Kinerja 2021			Anggaran 2021		
Tahun 2018 (%)		Tahun 2019 (%)		Tahun 2020 (%)		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100	50.00000	100	50.00000	100	50.00000	100%	100%	100%	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%

Tabel 3.12

**Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator
Persentase Partai Politik yang di Bina**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Partai Politik Yang Di Bina	100%	100%	100%

Tabel 3.13

Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Tahun 2021
3. Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	85%	75%	80%	83%	85%	100%

Pada indikator persentase peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan mengalami hambatan dalam capaian realisasi, dari capaian di tahun 2018 adalah sebesar 75% naik menjadi 80% pada tahun 2019, kegiatan Lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Untuk tahun 2020, dan Pada Tahun 2021 naik menjadi 85% dalam pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja belum dapat berjalan secara optimal daripada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia, selain itu juga adanya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran yang diperuntukan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bombana.

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan %
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	89%	75%	80%	83%	85%	95%

Tabel 3.15

Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan

Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2021	Persentase Realisasi
Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	Rp 75.000.000	Rp.43.300.000	Rp.70.000.000	Rp .30.000.000	Rp.75.000.000	100%

Tabel 3.16

Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan

Realisasi Kinerja dan Anggaran						Kinerja 2021			Anggaran 2021		
Tahun 2018 (%)		Tahun 2019 (%)		Tahun 2020 (%)		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100	43.400.000	100	70.000.000	100	30.000.000	85 %	85%	100%	Rp 75.000.000	75.000.000	100%

Tabel 3.17

**Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator
Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan
kebangsaan**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%

Tabel 3.18 Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Tahun 2021
4. Persentase ORMAS yang Aktif	90%	75%	80%	86%	90%	100%

Pada indikator persentase Ormas yang Atif t terjadi peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2018 adalah sebesar 75% naik menjadi 80% pada tahun 2019, naik menjadi 86% pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan menjadi 90% di tahun 2021. Di tengah masa pandemi Covid-19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinerjanya.

Tabel 3.19

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase ORMAS yang Aktif s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan %
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase ORMAS yang Aktif	90%	75%	80%	86%	90%	94,74%

Tabel 3.20

**Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan)
Persentase ORMAS yang Aktif**

Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2021	Persentase Realisasi
Persentase ORMAS yang Aktif	Rp 70.040.000	Rp 70.000.000	Rp 75.000.000	Rp 20.000.000	Rp 70.040.000	100%

Tabel 3.21

**Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator
Persentase Ormas yang Aktif**

Realisasi Kinerja dan Anggaran						Kinerja 2021			Anggaran 2021		
Tahun 2018 (%)		Tahun 2019 (%)		Tahun 2020 (%)		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100	70.000.000	100	75.000.000	100	20.000.000	90%	90%	100%	Rp 70.040.000	Rp 70.040.000	100%

Tabel 3.22

**Cost per outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)
Indikator Persentase Ormas yang Aktif**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Ormas Yang Aktif	100%	100%	-

Tabel 3.23
Tabel Capaian Sasaran

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Tahun 2021
5. Persentase Konflik yang tertangani	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%

Pada indikator persentase Konflik yang tertangani peningkatan capaian realisasi, dari capaian di tahun 2018 adalah sebesar 100% dan tetap menjadi 100% pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 tetap 100% Sampai di tahun 2021, dan. Di tengah masa pandemi Covid- 19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinerjanya.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik yang tertanganiPartisipasi s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan %
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100 %	100%

Tabel 3.25
Cost per Outcome (Alokasi per Sasaran Pembangunan) Persentase Konflik yang tertangani

Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2018	Realisasi Anggaran 2019	Realisasi Anggaran 2020	Realisasi Anggaran 2021	Persentase Realisasi
Persentase Konflik yang tertangani	Rp 642.905.309	Rp 235.000.000	Rp 200.000.000	Rp 170.000.000	Rp 642.905.309	100%

Tabel 3.26

Cost per Outcome (Pencapaian Kinerja dan Anggaran) Indikator Persentase Konflik yang tertangani

Realisasi Kinerja dan Anggaran						Kinerja 2021			Anggaran 2021		
Tahun 2018 (%)		Tahun 2019 (%)		Tahun 2020 (%)		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
100	235000000	100	200000000	100	170000000	100%	100%	100%	Rp 642.905.309	Rp 642.905.309	100%

Tabel 3.27

Cost per Outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya) Indikator Persentase Konflik yang Tertangani

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%	100%

3.3.1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa capaian kinerja mengalami hambatan/kendala. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab hambatan/kendala antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan terkendala diakibatkan pandemi Covid-19 dan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Denpasar;
- Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya melaksanakan protokol Kesehatan demi penanganan penanganan Covid- 19 di Kota Denpasar;
- Masih belum adanya optimalisasi perencanaan anggaran
- Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupten Bombana akan melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- Mempersiapkan perencanaan kegiatan dengan lebih baik lagi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dapat berjalan dengan lebih baik dan seluruh anggaran dapat direalisasikan;
- Komunikasi dan koordinasi antar pemegang puncak pimpinan perlu ditingkatkan sehingga gangguan dari kebijakan politik dapat ditekan sekecil- kecilnya;
- Perlu adanya penyeragaman pandangan terhadap regulasi yang digunakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di daerah;
- Diklat – diklat perlu diperbanyak sehingga SDM yang berkompotensi dapat diwujudkan.

3.3.2. Cost Per Outcome (Perjanjian Kinerja dan Anggaran)

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana pada tahun 2021 telah berjalan efektif dan efisien. Untuk indikator kinerja tingkat efisiensi mencapai 0% hingga 3%, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28

Cost per Outcome (Perjanjian Kinerja dan Anggaran)

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2021			Anggaran 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	85%	85%	100%	Rp 719.471.232	Rp 719.471.232	100%
	Persentase Partai Politik Yang Di Bina	100%	100%	100%	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100%
	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan	85%	85%	100%	Rp 75.000.000	Rp.75.000.000-	100%-

	Persentase ORMAS yang Aktif	90%	90%	100%	Rp 70.040.000	Rp 70.040.000	100%
	Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Rp 642.905.309	Rp 642.905.309	100%

Cost per Outcome (Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing – masing indikator kinerja yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.29

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	100%	100%	-
	Persentase Partai Politik Yang Di Bina	100%	100%	-
	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	100%	100%	-
	Persentase ORMAS yang Aktif	100%	100%	-
	Persentase Konflik yang tertangani	100%	100%	-

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dicapai seoptimal mungkin.

3.3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.30

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase Pemilih(17-45 thn) yang memperoleh pendidikan politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 642.482.486	Rp 642.482.486	100
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Rp 26.990.000	Rp 26.990.000	100

		Asing di Daerah			
	Persentase Partai Politik Yang Di Bina	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100
	Cakupan Masyarakat yang mengikuti Pembinaan wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 75.000.000	Rp.75.000.000	100
	Persentase ORMAS yang Aktif	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 35.020.000	Rp 35.020.000	100
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Rp.35.020.000	Rp.35.020.000	100

		Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Persentase Konflik yang tertangani	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 80.190.000	Rp.80.190.000	100

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* terkait atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana pada Tahun 2021 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2017 – 2022..

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sarannya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bombana tidak terlepas dari hambatan–hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan–hambatan dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2022 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia, Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOMBANA



dr. H. SUNANDARA.RAHIM .MM.,Kes
Pembina Utam Muda, Gol IV/c
NIP.19691607 2000003 1 004

